1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pengendalian Inflasi di Kabupaten soppeng terus berjalan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Meskipun Kabupaten Soppeng bukan merupakan kota pantauan IHK (Indeks Harga Konsumen) utama, indikator inflasi dan pergerakan komoditasnya merujuk pada perkembangan wilayah regional Provinsi Sulawesi Selatan dan pergerakan pasar domestik.

   Perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen) / Inflasi Kabupaten Soppeng yang Merujuk pada Kabupaten Wajo sebagai Sister City yaitu :

   - Pada Juli 2026 yaitu inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,49.
   - Pada Agustus 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,63.
   - Pada September 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,46.

   Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Jasa

   Komoditas yang mengalami kenaikan

   - Cabai Rawit dan Cabai merah menjadi salah satu pemicu inflasi utama akibat siklus cuaca dengan harga cabai rawit dikisaran Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000/kg ditingkat pasar tradisional.
   - Daging Ayam Ras dan Telur mengalami tekanan naik karena meningkatnya biaya pakan. Mengalami tren peningkatan harga tipis akibat penyesuaian biaya pakan ternak di tingkat produsen namun relatif stabil di akhir triwulan setelah adanya intervensi pasar murah.
   - Beras medium loKal stabil dikisaran Rp. 14.700 – Rp.16.600/kg. Pasokan dari Biulog melalui beras SPHP menjadi penyeimbang utama dipasar bebas.
   - Minyak Goreng, Gula Pasir, dan Tepung Terigu **:** Stok di pedagang eceran maupun pasar modern tetap aman dengan harga jual yang konsisten sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
   - **Komoditas yang melandai (deflasi)**
   - Bawang merah dan tomat memasuki masa panen di beberapa wilayah sentral produksi, memeberikan andildeflasi yang menahan laju inflasi bahan makanan.
   - Sektor Jasa dan Barang Lainnya
   - Emas perhiasan merupakan komoditas non- pangan dengan andil inflasi terbesar akibat lonjakan harga emas global.
   - Bensin dan Transportasi mengalami penyesuaian harga tidak langsung yang mempengaruhi biaya logistic pengiriman barang kewilayah pedalaman soppeng.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan tren ekonomi regional, karakteristik wilayah, serta dinamika komoditas nasional pada September 2026, identifikasi permasalahan utama dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Soppeng pada Triwulan III tahun 2026 berpusat pada beberapa tantangan struktural dan musiman.

Gejolak Harga Komoditas Pangan Utama

Secara nasional dan regional pada Triwulan III 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang utama inflasi. Di Kabupaten Soppeng, permasalahan ini dipengaruhi oleh :

- Kenaikan Harga Cabai dan Beras : Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras menjadi pemicu utama inflasi bulanan (*month-to-month*)
- Faktor Cuaca Musiman : Pada bulan Juli s/d September biasanya bertepatan dengan puncak musim kemarau di Kabupaten Soppeng, yang berpotensi mengganggu siklus tanam, memicu kekeringan, dan menurunkan volume produksi hortikultura lokal.

Masalah Distribusi dan Rantai Pasok Pangan

- Sebagai daerah yang wilayahnya terbagi atas 8 kecamatan, Soppeng menghadapi tantangan dalam kestabilan distribusi logistik antar kecamatan, terutama untuk menjangkau pasar-pasar tradisional di wilayah pelosok.
- Adanya kenaikan harga pada sektor energi/bensin secara nasional turut meningkatkan biaya transportasi logistik bahan pangan dari daerah produsen ke pasar konsumen

Keterbatasan Fiskal dan Optimalisasi Anggaran Daerah

- Adanya penyesuaian regulasi belanja daerah serta kebijakan pengetatan alokasi menuntut Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk lebih selektif.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Soppeng dituntut tetap optimal menjalankan program penekanan inflasi seperti operasi pasar murah / Gerakan Pangan Murah (GPM) dan bantuan social di tengah keterbatasan anggaran belanja operasional daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah pada triwulan III tahun 2026 di Kabupaten Soppeng berfokus pada penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga pasar secara berkala, serta antisipasi pergerakan harga pangan menjelang musim kemarau.

Kebijakan dan Langkah Strategis TPID Soppeng

- Pelaksanaan rapat teknis untuk pengendalian inflasi daerah (High Level meeting).

Pemantauan Harga yang rutin dilakukan TPID bersama instansi terkait aktif memonitor fluktuasi harga kebutuhan pokok dan bahan pangan penting strategis di pasar-pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas.
- Pelaksanaan sidak pasar dan distributor bahan pokok strategis.
- Penyaluran SPHP oleh Bulog.
- Mendorong integrasi antara TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan serta ekonomi daerah.
- Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Soppeng pada triwulan 3 tahun 2026 difokuskan pada penguatan sektor pertanian dan optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga pangan pokok berjalan efektif dengan tetap mempertahankan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan utama seperti beras.

   Evaluasi dan Fokus Kebijakan

   - Stabilitas Stok Pangan terutama Ketersediaan beras di Kabupaten Soppeng terpantau aman dan stabil tanpa kenaikan harga yang signifikan dengan adanya gerakan pangan murah secara berkala dan juga penyaluran SPHP.
   - Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan pengawasan terhadap komoditas hortikultura seperti cabai merah, tomat, serta minyak goreng yang sempat mengalami fluktuasi harga mengikuti tren nasional.
   - Jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hibrida bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
   - Optimalisasi sektor pertanian dan perairan terus ditingkatkan guna memastikan produktivitas panen tetap terjaga demi daya beli masyarakat.
   - Penguatan koordinasi lintas sektor perangkat daerah untuk pelaporan data harga yang akurat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Keterjangkauan Harga

   - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di berbagai kecamatan.
   - Operasi Pasar / Sidak pasar dengan Memantau harga beras, cabai, dan bawang secara
   -

harian.
- Mengintensifkan pemantauan harga dan stok harian di pasar-pasar tradisional di Soppeng (seperti Pasar Sentral, Pasar Cabenge dan Pasar Takkalala).

Ketersediaan Pasokan

- Gerakan Tanam Mandiri **:** Menggalakkan penanaman cabai dan bawang di pekarangan warga.
- Peningkatan kerjasama antar daerah surplus dan defisit untuk menjaga pasokan pangan.

Kelancaran Distribusi

- Optimalisasi sistem informasi berbasis online. Dengan memanfaatkan pelaporan data harga secara real-time
- Memastikan jalur distribusi antar kecamatan di Soppeng bebas hambatan.

Komunikasi Efektif

- Koordinasi dan Rapat Koordinasi untuk menyusun strategi dan memantau perkembangan inflasi.
- Mengedukasi warga agar berbelanja sesuai kebutuhan, bukan panic buying.